

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PENGAWASAN  
PEMOTONGAN HEWAN QURBAN ( Studi Dinas Pertanian Kota Malang )**

**Identitas Penulis**

**Nama : Hary Saputra Hadi**  
**NIM : 125010101111130**  
**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**  
**Jangka Waktu**  
**Penelitian : 6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 30 Mei 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum**  
**NIP. 196008101986011002**

**Agus Yulianto SH., MH**  
**NIP. 195907171989032001**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum**  
**NIP. 196008101986011002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN MENTERI  
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PENGAWASAN  
PEMOTONGAN HEWAN QURBAN**

**( Studi Dinas Pertanian Kota Malang )**

**Oleh:**

**HARY SAPUTRA HADI  
125010101111130**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum  
NIP. 196008101986011002**

**Agus Yulianto SH., MH  
NIP. 195907171989032001**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum  
NIP. 196008101986011002**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

**Dr.Rachmad Safa'at, SH, M.Si  
NIP.196208051988021001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk, dan hidayahnya, serta Nabi Muhammad SAW atas syafaat dan panutannya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, dengan berbagai nasehat, motivasi, masukan serta kritik kepada penulis, diantaranya penulis haturkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan keberkahannya selama ini.
2. Ayahanda Penulis ALM Samsul Hadi dan Ibunda Penulis Sri Harneni yang sangat Penulis cintai
3. Saudara-saudara Penulis tercinta Handika Saputra Hadi, Yulia Citra Hadi, Karunia .
4. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan atas saran dan masukannya.
6. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penyusunan penelitian ini yang berupa bimbingan, diskusi, serta arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Bapak Agus Yulianto SH., M.Si selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak sumbangsih moral maupun material berupa bimbingan, diskusi, serta saran dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar dan jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. KH. Dr. Achmad Hasyim Muzadi selaku pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang beserta dewan asatidz yang selalu memberikan bimbingan rohani kepada penulis.
10. Seluruh sahabat-sahabat STMJ angkatan 2012 Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi secara moril dan semangat selama menempuh pendidikan di Kota Malang.
11. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya para sahabat penulis Herzie Riza, Muhammad Ridho, Rizky Aditya, Badrian fitra, Bagus Dwi Rianto,

- Dio Tegar, Cokorda Gde, Muhammad Chairun Nasir, Agung Nugroho, Happy Herdiansyah, Septiono yang selalu memberikan motivasi dan semangat, serta turut terlibat dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
12. Seluruh Anggota dari Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Hukum Administrasi Negara 2012 yang telah berkontribusi dan memfasilitasi penulis untuk saling bertukar informasi.
  13. Rekan-rekan Grup MABA Ermessen FH 2012
  14. Rekan-rekan Kelompok 13 PPM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  15. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya penelitian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Besar harapan penulis skripsi ini akan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan kepada siapapun pihak yang membutuhkan skripsi ini.

Malang, 28 juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
Ringkasan .....	ix
Summary .....	xi

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Pelaksanaan .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pertanian Bidang Perternakan Dan Kesehatan Hewan .....	15
1. Tugas pokok dan Fungsi.....	16
2. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Menteri Pertanian .....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Hewan Qurban .....	19
E. Tinjauan Umum Tentang Dokter Hewan .....	20
F. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan <i>Ante-Mortem</i> .....	21
G. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan <i>Post-Mortem</i> .....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	26
D. Jenis Sumber dan Data .....	26
1. Jenis Data .....	26
a. Data Primer.....	26
b. Data Sekunder.....	27
2. Sumber Data .....	27

a. Sumber Data Primer .....	27
b. Sumber Data Sekunder .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
1. Tehnik Pengumpulan Data Primer .....	28
2. Tehnik Pengumpulan Data Sekunder .....	29
3. Studi Kepustakaan .....	29
4. Studi Dokumen .....	29
5. Internet .....	30
F. Populasi dan Sempel .....	30
1. Populasi .....	30
2. Sample .....	30
G. Teknik Analisa Data.....	30
H. Devinisi Oprasional .....	31
1. Pelaksanaan .....	31
2. Hewan Qurban .....	32
3. Dokter Hewan .....	32
4. Ante-mortem .....	32
5. Post-mortem .....	32
<b>BAB IV HASILDAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	33
a. Kondisi Geografis.....	33
B. Visi Misi Kota Malang .....	34
1. Visi Kota Malang.....	34
2. Misi Kota Malang .....	34
3. Pembagian Administratif .....	35
1. Kecamatan Kedung Kandang.....	35
2. Kecamatan Sukun .....	35
3. Kecamatan Blimbing .....	35
4. Kecamatan Klojen .....	36
5. Kecamatan lowokwaru.....	36
C. Gambaran Umum Dinas Pertanian Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan.....	
1. Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan .....	35

2. Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban.....52
3. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang terkait Pengawasan Kesehatan Hewan Qurban ..... 57
4. Upaya yang Dilakukan Dinas Pertanian Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan dengan Memeriksa Kesehatan Hewan Qurban.....61

**BAB V PENUTUP ..... 64**

- A. Kesimpulan..... 64
- B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA .....**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Tabel Penelitian terdahulu mengenai Hewan Qurban .....	8
Tabel 2 Data pemeriksaan <i>ANTE-Mortem</i> ditempat penjualan hewan/ternak di Kota Malang tahun 2016.....	51
Tabel 3 Data pemeriksan Hewan Qurban di Kota Malang tahun 2016.....	51
Tabel 4 Data Kasus Penyakit Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> Hewan Qurban di Kota Malang Tahun 2016.....	58





## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan (SK) Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan (Plagiasi)



## RINGKASAN

Hary Saputra Hadi, NIM 125010101111130, PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN QURBAN ( Studi Dinas Pertanian Kota Malang ) Dosen Pembimbing Utama Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., dan Dosen Pembimbing Pendamping Bapak Agus Yulianto SH., MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban, Peraturan Menteri Pertanian No 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban yang dimaksud dengan Hewan qurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Menteri Pertanian no 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban dan juga memenuhi syariat islam, Lazimnya ternak yang dijadikan hewan qurban di Indonesia adalah, Kambing, Domba, Sapi dan Kerbau. Menjelang hari raya Idul Adha mulai banyak yang membeli hewan qurban untuk di sembelih, sehingga sangat diperlukan pengawasan yang intensif sehingga hewan yang dijual terjamin kesehatannya.

Berdasar permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu, Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban ? Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Di Bidang Perternakan Dan Kesehatan Hewan Kota Malang terkait pengawasan kesehatan hewan qurban?dan Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pertanian di Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan dengan memeriksa kesehatan hewan qurban?

Ada pun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data terkait penerapan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Dinas pertanian, khususnya bagian perternakan, dan Satreskrim. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban masih belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hasil penelitian dilapangan masih banyak hewan qurban yang tidak dilakukan pengawasan sesuai aturan tersebut, misalnya tidak ada lebel terhadap hewan qurban yang diperiksa oleh Dinas pertanian, kemudian pemeriksaan dan pngawasannya dilakukan secara acak tidak secara menyeluruh, dikarenakan dari pihak Dinas pertanian khususnya di bagian peternakan masih sangat kekurangan Dokter hewan untuk bagian pemeriksaan hewan qurban, sehingga tidak semua hewan qurban lolos dalam pemeriksaan.

## SUMMARY

*Hary Saputra Hadi, NIM 125010101111130, IMPLEMENTATION ARTICLE 38 SECTION (2) REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 114 / PERMETAN / PD.410 / 9/2014 ABOUT QURBAN ANIMAL CUTTING (Study of Agriculture Office of Malang City) Main Lecturer of Mr. Lutfi Effendi, SH.,M.Hum., And Supervising Lecturer of Mr. Agus Yulianto SH.,MH*

*This study aims to determine whether the effective Implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 on Slaughtering Animal Sacrifice, Regulation of the Minister of Agriculture No. 114 / Permentan / PD.410 / 9 / 2014 on the Cutting of Animal Sacrifice that is meant by Animal qurban is an animal that fulfill the requirement according to Article 5 of Regulation of Minister of Agriculture Minister of Agriculture No. 114 / Permentan / PD.410 / 9/2014 About Cutting of Qurban Animals and also fulfill Islamic Shariah, Normally animal made animal qurban in Indonesia is, Goat, Sheep, Cow and Buffalo. Towards the feast of Eid al-Adha began to mushroom many stalls qurban animal traders in the street and other strategic areas, so it is necessary intensive supervision so that the animals sold are guaranteed health.*

*Based on the problems mentioned above, then the problem that became the focus in this research is, Pelabuhan Berant 38 Ayat (2) Minister of Manpower Minister of the Republic of Indonesia Number 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 Quoted Cutter Hewan Qurban? what are the obstacles faced by the agricultural service in the field of animal husbandry and animal health of poor city related to animal health surveillance qurban?*

*and how is the effort made by the agriculture service in the field of animal husbandry and animal health by checking the health of animal qurban?*

*There is also the type of research used by the author is the type of empirical research with the method of sociological juridical research conducted by direct research to obtain data related to the application of Article 38 Paragraph (2) Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 About the Cutting of Animal Qurban*

*Method of data retrieval is done by way of study in the field by conducting an interview to the Department of agriculture, especially the section pertenakan, and Satreskrim. The data analysis used by the writer use descriptive qualitative method which is a description in the form of sentence which is orderly, coherent, and effective.*

*Based on the results of this study it can be seen that the Implementation of Article 38 Paragraph (2) Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 About the Cutting of Qurban Animals is still not fully effective because there are still research results in the field are still many animals qurban which is not supervised according to the rules, for example no lebel against animal qurban inspected by the Department of agriculture, then examination and pgagaasnya done randomly not thoroughly, because of the Department of agriculture, especially in the farm is still very short Veterinarians for the animal examination qurban, so not all animals qurban pass the examination.*

**PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN MENTERI  
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PENGAWASAN  
PEMOTONGAN HEWAN QURBAN (Studi Dinas Pertanian Kota Malang)**

**Hary Saputra Hadi**

**Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Bapak Agus Yulianto SH., MH**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

[harysaputrahadi@gmail.com](mailto:harysaputrahadi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban, Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena masih adanya terdapat hasil penelitian dilapangan masih banyak hewan qurban yang tidak dilakukan pengawasan sesuai aturan tersebut, misalnya tidak ada lebel terhadap hewan qurban yang diperiksa oleh Dinas pertanian, dikarenakan dari pihak Dinas pertanian khususnya di bagian peternakan masih sangat kekurangan Dokter hewan untuk bagian pemeriksaan hewan qurban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban, belum berjalan efektif karena masih ditemukannya hambatan yang masih belum terselesaikan dan belum memenuhi factor pendukung efektivitas suatu peraturan.

**Kata kunci : Pelaksanaan, Pasal 38 Ayat (2) Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 , Pemotongan Hewan Qurban**



**IMPLEMENTATION OF ARTICLES OF QURBAN Animal Husbandry (Study  
of Agriculture Office of Malang City) NUMBER 114 / PERMETAN / PD.410 /  
9/2014 REGULATION OF MINISTER OF AGRICULTURE REPUBLIC OF  
INDONESIA NUMBER 114 / PERMETAN / PD.410 / 9 /**

**Hary Saputra Hadi**

**Mr. Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Mr. Agus Yulianto SH., MH**

*Faculty of Law, Universitas Brawijaya*

[harysaputrahadi@gmail.com](mailto:harysaputrahadi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness in the effective application of the Implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 About the Observation of the Cutting of Animal Sacrifice, As for the background of this research is because it is still there are research results in the field are still many animals qurban that is not conducted supervision according to the rules, for example there is no lebel against animals qurban that examined by the Department of agriculture, because of the Department of agriculture, especially in the farm is still very short of veterinarian for the animal examination qurban. The research approach uses sociological juridical approach. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques are interview techniques to related parties and literature study. The results of the research indicate that in the effective implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 on the Observation of the Cutting of Animal Sacrifice, has not been effective since there are still unresolved obstacles factors supporting the effectiveness of a rule.*

**Keywords: Implementation, Article 38 Paragraph (2) No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014, Cutting Animal Qurban**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk mayoritas Negara Islam terbesar, salah satunya dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha umat muslim khususnya di Indonesia, banyak masyarakat yang menjalankan *sunnah mukkadah* dengan ikut berqurban bagi mereka yang sanggup atau berkecukupan, karena salah satunya dengan cara inilah di Hari Raya Idul Adha umat muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Qurban yang di lakukan oleh umat Muslim adalah dengan menyembelih hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing dan domba yang kemudian akan di *shadaqahkan* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban yang dimaksud dengan Hewan qurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Menteri Pertanian no 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban<sup>2</sup> dan juga memenuhi syariat islam, Lazimnya ternak yang dijadikan hewan qurban di Indonesia adalah, Kambing, Domba, Sapi dan Kerbau. Menjelang hari raya Idul Adha mulai banyak menjamur lapak-lapak pedagang hewan qurban di badan jalan dan area strategis lainnya, sehingga sangat diperlukan pengawasan yang intensif sehingga hewan yang dijual terjamin kesehatannya.

---

<sup>1</sup> [http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi\\_10.11.3605.pdf](http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi_10.11.3605.pdf) , hari raya idhul adha,mengenai hari raya qurban, diaskes tanggal 6 oktober 2016

<sup>2</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian No 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban' Persyaratan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hewan harus:

- a. sehat;
- b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
- c. tidak kurus;
- d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
- e. cukup umur



## BAB II

### TINJAUAN PENELITIAN

#### A. Pengertian Pelaksanaan

Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian pelaksanaan adalah hal, cara atau hasil kerja melaksanakan.<sup>1</sup> Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai penerapan atau implementasi dari ketentuan normatif pada peristiwa tertentu, dimana tujuan adalah sebagai hasil akhirnya. Tujuan yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky, pelaksanaan diartikan sebagai evaluasi. Menurut Browne dan Wildavsky, pelaksanaan diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan menurut Parlata Westa merupakan suatu aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Abdullah Syukur, pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rudy T. Erwin, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 88.

<sup>2</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>3</sup> Intan Fikriani, Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Skripsi, 2015, hlm. 13.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>2</sup> Metode dalam penelitian Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Qurban. .:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan dalam lapangan, dapat juga disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu metode untuk meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di dalam masyarakat. Dari segi penelitian hukum, penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris). Alasan peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris yaitu dalam pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan *Ante-Mortem* Terkait Pengawasan Hewan Qurban Oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Malang. adalah terdapat kenyataan di lapangan pemeriksaan setelah pemotongan bukan pemeriksaan hewannya tapi daging yang diperiksa. Penelitian sangat berkaitan erat dengan kenyataan di masyarakat masih banyak hewan qurban yang berpenyakit dan berpengaruh terhadap masyarakat, disini pihak kesehatan hewan harus lebih ekstra teliti untuk menangani pemeriksaan kesehatan hewan qurban di Kota Malang, dari data yang saya dapat, daging sapi, kambing maupun domba masih banyak terkena virus atau berpenyakit, padahal ini hewan yang sudah diperiksa dan memiliki SKKH, hewan yang berpenyakit seharusnya dagingnya tidak harus di bagi kan kepada masyarakat, setidaknya daging itu disisihkan atau di buang dengan cara dikubur ataupun di bakar, supaya tidak menulari daging yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup> Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 51.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Kondisi Geografis

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya di kelilingi oleh Kabupaten Malang Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, kota Malang sebagai mana juga dikenal dengan sebutan *Kota Pendidikan*, karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama yaitu diantaranya Perguruan tinggi negeri Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang (d/h IKIP Malang), Universitas Islam Negeri Malang, Akademi Penyuluh Pertanian (APP), Politeknik Negeri Malang (Poltekma), serta terdapat cabang Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). Beberapa perguruan tinggi swasta terkemuka diantaranya: Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka, Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Kanjuruhan, Universitas Wisnu Wardhana, STIE Malang Kucswara, Universitas Widyagama, Institut Teknologi Nasional dan sebagainya. Sebagai kota pendidikan<sup>1</sup>.

Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang

---

<sup>1</sup> [http://budpar.malangkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6:sejarah-kota-malang&catid=5:website&Itemid=6](http://budpar.malangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6:sejarah-kota-malang&catid=5:website&Itemid=6),

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban, dalam pengawasan pemotongan hewan qurban terkait fungsi kesehatan hewan merupakan kewajiban dari Dinas pertanian kota Malang khususnya di bidang peternakan. Namun hasil penelitian dilapangan masih banyak hewan qurban yang tidak dilakukan pengawasan sesuai aturan tersebut, misalnya tidak ada lebel terhadap hewan qurban yang diperiksa oleh Dinas pertanian, kemudian pemeriksaan dan pengawasannya dilakukan secara acak tidak secara menyeluruh, dikarenakan dari pihak Dinas pertanian khususnya di bagian peternakan masih sangat kekurangan Dokter hewan untuk bagian pemeriksaan hewan qurban, sehingga tidak semua hewan qurban lolos dalam pemeriksaan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang terkait Pengawasan Kesehatan Hewan Qurban baik sebelum penyembelihan (*ante mortem*) maupun setelah penyembelihan (*post mortem*) adalah:
  - a. Berkaitan dengan tempat penjualan hewan qurban, karena terlalu banyaknya tempat-tempat penjualan hewan qurban yang menyebar ke seluruh kota Malang, maka hal ini sangat menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan sementara petugas pengawas dari dinas pertanian adalah sangat terbatas, didukung pula oleh banyaknya penjual hewan qurban yang masih belum memahami tentang hewan qurban yang sehat yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Dinas perternakan dan kesehtn hewan, Leaflet cara memilih dan memotong hewan qurban yang dikeluarkan oleh dinas perternakan dan kesehatan hewan
- Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian
- Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Rudy T. Erwin, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Soeparno, ilmu dan teknologi daging,
- Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2004
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rieneke Cipta, Jakarta, 2002,
- Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Soeparno. 1992. Ilmu dan Teknologi Daging. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

## INTERNET

- [http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi\\_10.11.3605.pdf](http://repository.amikom.ac.id/files/Publikasi_10.11.3605.pdf) , hari raya idhul adha, mengenai hari raya qurban, diaskes tanggal 6 oktober 2016
- <http://disnak.lebakkab.go.id/memilih-hewan-qurban-yang-sehat/> syarat memilih hewan qurban, tentang hewan qurban, diaskes tanggal 6 oktober 2016
- <http://ditjenhik.pertanian.go.id/index.php?page=profil&action=info&p=vm> atmortem dan posmortem, tentang pemeriksaan hewan qurban, 10 oktober 2016
- <http://pertanian.malangkota.go.id/profil-kami/tupoksi/bidang-peternakan-dan-kesehatan-hewan/> pertaian malang, tentang kesehatan hewan, 10 oktober 2016
- <http://DinasPertanian.go.id/dibidang/peternakan/dan/kesehatan/hewan> surat keterangan kesehatan hewan, tentang kesehatan hewan qurban, diaskes pada tanggal 8 oktober 2016
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10166/SKRIPSI%20ZULKIFLI%20ASDAR%20%20I311%2008%20252.pdf?sequence=1> Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kebau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar, tentang pemeriksaan ante mortem, diaskes 07 november 2016

## JURNAL

- Abdullah Syukur, Kumpulan jurnal “Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang, 1987
- Muhamad Abduh, “ Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penjualan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisioanal) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam, (Panam: Uin Suska 2002), h.29
- Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih al-Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet ke-5 h 611



**SKRIPSI**

Intan Fikriani, Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan  
Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Skripsi, 2015

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

peraturan menteri pertanian No 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan  
Hewan Qurban'

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan  
Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat  
Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari  
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan  
Hewan

peraturan walikota malang nomer 53 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan  
tata kerja dinas pertanian